

## Analisis Indikasi dan Pola Kemiskinan Masyarakat Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

Rusman Rasyid<sup>1</sup>, Gufran D. Dirawan<sup>2</sup>, Ramli Umar<sup>2</sup> & Nurlita Pertiwi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, Indonesia

<sup>2</sup>Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email : [rusman\\_rasyid68@yahoo.com](mailto:rusman_rasyid68@yahoo.com)



© 2017 – UEJ Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup  
Universitas Negeri Makassar. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah Licensi CC BY-NC-4.0  
(<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>)

### **Abstract.**

*Makassar city as the capital of South Sulawesi, can not be spared from the phenomenon of poverty. The development of Makassar relatively rapidly the last few years have led to this city was the destination of migration from other cities in eastern Indonesia that has a level of development and high population density. This has implications for the increase in the number of poor people in this city. Sekaitan with it, this paper aims to present an analysis of the patterns of poverty in Makassar conducted descriptive based on information gathered through observations, interviews with informants in 100 poor households as samples taken proportionally. The results of these studies show that the poor in Makassar tend to fall into the pattern of subsistence poverty, poverty, poverty of protection and understanding, but not forming patterns of participation poverty, poverty or lack of liberties identity. The results of this paper are expected to identify the characteristics of the typology and determine patterns of urban poor groups that are highly relevant to an attempt by the government to tackle the problem of poverty.*

**Keywords:** *Poverty City, indications of poverty, poverty Pattern.*

## PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan di Indonesia, jelas tidak hanya menjadi “milik” pedesaan tetapi juga merupakan masalah perkotaan. Suparlan (2005) mengemukakan bahwa masalah kemiskinan di perkotaan merupakan masalah laten dan kompleks yang implikasi sosial dan kebudayaannya bukan hanya melibatkan dan mewujudkan berbagai masalah sosial yang ada di kota yang bersangkutan saja atau menjadi masalah orang miskin di kota tersebut, tetapi juga melibatkan masalah-masalah sosial yang ada di pedesaan.

Menurut Moser, Gatehouse and Garcia dalam Arman (2010), Tiga ciri kehidupan perkotaan yaitu ketergantungan akan ekonomi uang (*commodization*), lingkungan tempat tinggal yang kurang memadai (*enviromental hazards*) dan kehidupan sosial yang individualisitas (*social fragmentation*). Oleh karena itu, Berdasarkan pernyataan tersebut kemiskinan perkotaan mempunyai fenomena yang multi dimensi yang meliputi rendahnya tingkat pendapatan, kesehatan dan pendidikan, kerawanan tempat tinggal dan pribadi, serta ketidakberdayaan. Hal tersebut mengakibatkan penduduk miskin perkotaan tinggal di pemukiman yang kumuh dan padat sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan dasar dan kesempatan kerja. Selain itu juga kurang mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan keamanan pribadi. Kemiskinan perkotaan sering dicirikan sebagai deprivasi kumulatif yaitu satu dimensi kemiskinan sering menjadi penyebab atau penyulut dari dimensi kemiskinan lainnya.

Menurut Badan Pusat Statistik tingkat kemiskinan kota pada tahun 2012 mencapai 8,4 % dari total populasi penduduk di Indonesia kemudian meningkat pada tahun 2013 menjadi 8,5% dan kembali menurun menjadi 8,2 % pada tahun 2014 (BPS, 2014).

Kota Makassar merupakan salah satu kota di provinsi Sulawesi Selatan yang yang juga tidak bisa terlepas dari persoalan kemiskinan. Penduduk Kota Makassar pada tahun 2010 sekitar 1,339,374 jiwa (BPS Kota Makassar, 2011). Perkembangan Kota Makassar yang relatif cepat beberapa tahun terakhir

ini menyebabkan kota ini menjadi daerah tujuan migrasi penduduk dari beberapa wilayah lainnya di wilayah Indonesia Timur. Hal ini memiliki implikasi terhadap peningkatan masyarakat miskin kota. Sebagai gambaran jumlah jumlah anggota rumah tangga miskin sebanyak 78.000 jiwa. (BPS, 2013). Penyebab kemiskinan kota pun bervariasi sehingga membentuk kecenderungan penyebaran yang sangat beragam. Kondisi ini berdampak pada sulitnya menemukan solusi pola penanggulangan yang tepat dalam mengatasi masalah kemiskinan kota tersebut. Beberapa program pemerintah telah dilaksanakan seperti halnya yang banyak dilakukan di daerah lainnya namun masih dianggap gagal.

Gagalnya beberapa program penanggulangan kemiskinan kota disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah data base yang kurang akurat dan tidak valid, kekeliruan dalam pendekatan, kewenangan dan kelembagaan dan lemahnya perumusan pola dan metode penanggulangan. Khususnya di Kota Makassar, pola distribusi yang tidak terpusat, beragamnya faktor penyebab dan pembauran dengan masyarakat menyebabkan sulitnya pendekatan spasial atau wilayah.

Mengacu pada fakta bahwa kemiskinan merupakan isu strategis nasional yang sesegara mungkin harus dapat diatasi, maka sangat diperlukan sesegara mungkin suatu tindakan tanggap dalam menemukan pola yang lebih tepat. Tindakan ini hanya dapat dilakukan dengan melakukan kajian komprehensif terhadap masalah kemiskinan kota dengan menggunakan metodologi ilmiah yang sistematis. Sehingga diharapkan hadirnya tulisan ini dapat bermanfaat untuk melengkapi dan

Memberikan data ilmiah yang akurat mengenai karakteristik dan pola masyarakat miskin di wilayah kota Makassar, yang pada akhirnya dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan menentukan metode pola penanggulangan masyarakat miskin berdasarkan karakteristik dan pola kemiskinan yang terbentuk.

## **METODE KAJIAN**

Jenis kajian yang digunakan dalam tulisan ini adalah jenis kajian deskriptif dengan Teknik pengambilan sampel menggunakan metode proporsional area random sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan wilayah dimana masing - masing bagian terambil sampelnya secara acak di 14 Kecamatan di Kota Makassar. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 100 keluarga miskin (1 orang mewakili 1 keluarga miskin) dengan asumsi bahwa data yang diperoleh adalah data homogen.

Data-data yang peroleh dilapangan dikelompokkan kedalam data primer dan data sekunder. Data sekunder yang diperoleh dari beberapa lembaga terkait seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Sosial, dan sebagainya, sedangkan data primer dikumpulkan dari hasil wawancara langsung terhadap 100 keluarga miskin. Analisis pola kemiskinan yang sesuai di kota Makassar yang diperoleh dengan menganalisis hasil wawancara dan pengamatan dan dikaitkan dengan teori pola kemiskinan melalui analisis deskriptif kualitatif untuk memuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Suharto, 1993)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Indikasi Kemiskinan Masyarakat.**

Guna mengetahui apakah masyarakat di kota Makassar dapat dikategorikan kepada masyarakat miskin maka perlu dilakukan analisis dengan membandingkan antara karakteristik masyarakat setempat terhadap teori kemiskinan

. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Komunikasi dan Informatika terdapat 12 Indikator dalam Program Pemberian Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang dapat mengindikasikan masyarakat sebagai rumahtangga miskin di kota Makassar adalah sebagai berikut :

#### **1) *Indikasi Kemiskinan Luas Lantai Bangunan tempat tinggal***

Ditinjau dari luas lantai bangunan tempat tinggal rumah tangga masyarakat di kota Makassar dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin, hal ini terlihat bahwa dari 100 responden 53 diantaranya mempunyai luas bangunan rumah kurang dari 8 meter persegi dan rata-rata merupakan hasil warisan keluarga dan bukan dari hasil usaha sendiri.

#### **2) *Indikasi Kemiskinan Jenis Lantai Bangunan tempat tinggal***

Ditinjau dari jenis lantai bangunan tempat tinggal rumah tangga masyarakat di kota Makassar cukup baik, hal ini terlihat bahwa dari 100 responden 73 diantaranya menggunakan semen dan keramik sebagai lantai bangunan rumah, disamping terdapat pula 27 masyarakat yang menggunakan lantai bangunan dari tanah, kayu murah, dan kayu yang berkualitas rendah.

#### **3) *Indikasi Kemiskinan Jenis Dinding Bangunan tempat tinggal***

Ditinjau dari jenis dinding bangunan tempat tinggal rumahtangga masyarakat di kota Makassar kurang baik, hal ini terlihat bahwa dari 100 responden 61 diantaranya menggunakan bambu, tembok tanpa plaster, dan kayu murah sebagai dinding bangunan rumah, disamping itu terdapat pula sekitar 39 masyarakat yang menggunakan dinding bangunan dari tembok yang ditambal

4) ***Indikasi Kemiskinan Kepemilikan Fasilitas MCK***

Ditinjau dari fasilitas buang air besar atau MCK (mandi cuci kakus) masyarakat di kota Makassar sudah memenuhi kebutuhan. hal ini terlihat dengan adanya 87 orang dari 100 responden yang mempunyai fasilitas buang air besar sendiri, disamping masih ada 13 orang yang mempunyai kebiasaan membuang air besar pada sungai, pantai ataupun semak menyebabkan mereka tidak mempunyai fasilitas buang air besar sendiri.

5) ***Indikasi Kemiskinan Kepemilikan Sumber Penerangan Rumahtangga***

Ditinjau dari sumber penerangan rumahtangga, maka masyarakat di kota Makassar sudah memenuhi kebutuhan, hal ini terlihat dengan adanya 91 orang responden yang mempunyai sumber penerangan menggunakan listrik walaupun mempunyai daya yang masih sangat rendah yang hanya mampu digunakan untuk penerangan lampu saja tidak untuk keperluan alat-alat rumahtangga yang memerlukan listrik seperti dispenser, kompor listrik, dan sebagainya. Selain itu terdapat pula 9 orang yang menggunakan pelita dan strongkeng sebagai sumber penerangan karena daerahnya yang tidak mempunyai jaringan listrik karena merupakan daerah ujung pemukiman dan kebanyakan merupakan lahan tambak.

6) ***Indikasi Kemiskinan Sumber Air Minum***

Ditinjau dari sumber air minum, pemukiman penduduk di kota Makassar memiliki layanan sumber air bersih menggunakan PDAM yaitu sekitar 68 persen dari 100 responden yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di kota Makassar, bahkan 32 orang responden masih menggunakan sumur dan air hujan sebagai sumber air bersih, hal ini di karenakan mahalnya beban yang harus dibayar oleh para pengguna PDAM

7) ***Indikasi Kemiskinan Sumber bahan Bakar***

Ditinjau dari sumber bahan bakar yang digunakan, 69 orang responden masyarakatkota Makassar menggunakan gas sebagai sumber bahan bakar. Hal ini merupakan dampak dari adanya program kompersi minyak tanah ke gas yang dicanangkan oleh pemerintah, tetapi hal tersebut tidak langsung mengarahkan masyarakat memakai gas sebagai sumber bahan bakar tetapi ada juga 31 orang yang masih menggunakan kayu dan minyak tanah

8) ***Indikasi Kemiskinan Konsumsi Daging atau Susu***

Indikator ini mengkategorikan suatu rumahtangga kedalam kriteria miskin apabila hanya mengkonsumsi daging, susu atau ayam hanya satu kali dalam seminggu atau kurang dari satu kali seminggu. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa jumlah rumahtangga miskin berdasarkan indikator ini sebesar 85 rumahtangga atau lebih dari separuh jumlah keseluruhan responden, rata-rata dari mereka mengkonsumsi daging, susu atau ayam hanya 1 kali atau kurang dari 1 kali seminggu

9) ***Indikasi Kemiskinan Belanja Pakaian***

Rumahtangga miskin berikutnya ketika suatu rumahtangga memiliki indikator atau kriteria hanya berbelanja / membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. Berdasarkan indikator ini ada sebanyak 52 rumahtangga atau lebih dari separuh jumlah keseluruhan responden, rata-rata dari mereka hanya membeli 1 stel atau kurang dari 1 stel pakaian baru setahun

10) ***Indikasi Kemiskinan Kesanggupan menyediakan bahan makanan***

Suatu rumahtangga dikategorikan miskin menurut indikator ini ketika hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa jumlah rumahtangga miskin berdasarkan indikator ini sebesar 38 rumahtangga atau kurang dari setengah dari total responden, rata-rata dari mereka makan dua kali sehari

11) ***Indikasi Kemiskinan Kesanggupan membayar Biaya Pengobatan***

Suatu rumahtangga miskin ketika tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik jika ada salah satu anggota keluarga yang sakit. Rumahtangga miskin menurut indikator ini sebanyak 36 rumahtangga, hal ini disebabkan oleh mahalnya biaya pengobatan sehingga masyarakat jarang berobat ke dokter atau puskesmas

12) ***Indikasi Kemiskinan Sumber Pendapatan***

Rumahtangga dikategorikan miskin menurut indikator ini ketika sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah Petani dengan luas lahan 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh

perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan. Dari hasil penelitian terdapat 50 rumahtangga miskin dari total responden di Kota Makassar dengan sumber pendapatan yang memiliki gaji / upah di bawah Rp 600.000 per bulan, apalagi setiap keluarga di masyarakat rata-rata memiliki 3-4 orang anak menyebabkan penghasilan tidak memadai jika dibandingkan dengan jumlah tanggungan

### 13) *Indikasi Kemiskinan Tingkat Pendidikan*

Kriteria kemiskinan menurut indikator ini ketika pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah, tidak tamat SD atau hanya SD. Dari hasil penelitian terdapat 58 rumahtangga responden di Kota Makassar tergolong miskin, 4 KK yang tidak sekolah 38 KK hanya mengenyam pendidikan sampai SD dan 14 KK yang tidak tamat SD.

### 14) *Indikasi Kemiskinan Kepemilikan Tabungan*

Suatu rumahtangga dikategorikan miskin diukur dengan tidak memiliki penyimpanan / barang yang mudah di jual dengan nilai minimal Rp 500.000, seperti: sepeda motor (kredit / non kredit), emas, ternak, motor, atau barang modal lainnya. Hasil kajian ini menunjukkan ada 65 rumah tangga miskin dari keseluruhan responden yang memiliki tabungan dari hasil pekerjaan pokok, pendapatan masyarakat hanya mampu untuk membeli kebutuhan makan dan minum setiap harinya

## **Pola Kemiskinan Masyarakat.**

Berdasarkan karakteristik masyarakat di kota Makassar yang diperoleh dari pengamatan lapangan dan wawancara dengan menggunakan kuesioner serta dikaitkan dengan teori pola kemiskinan dari Max-neef sebagaimana yang dicantumkan dalam tinjauan pustaka, maka pola kemiskinan yang sesuai di Kota Makassar, adalah sebagai berikut:

### 1) **Kemiskinan sub-sistensi,**

Permukiman kota Makassar mengalami kemiskinan sub-sistensi karena:

- a) Sebagian besar masyarakat memiliki bangunan rumah yang terbuat dari bahan dasar lantai dan dinding rumah yang terbuat dari bambu, dan kayu kualitas rendah. Selain itu, tingkat kepadatan di permukiman masyarakat termasuk pada kategori yang sangat padat hal tersebut dapat dilihat pada jarak antara rumah yang hanya berjarak sekitar 2- 5 meter ditambah lagi dengan luas lantai bangunan rumah yang kurang dari 8 meter persegi semakin memperjelas adanya kemiskinan di wilayah ini.
- b) Ketersediaan fasilitas air bersih yang terdapat pada kawasan ini termasuk cukup baik dikarenakan banyak masyarakat yang menggunakan PDAM sebagai sumber air bersih, namun ada juga warga masyarakat yang masih menggunakan sumur dan merupakan milik umum sehingga tidak menimbulkan keleluasaan bagi para penggunaanya.
- c) Dari segi pendapatan yang diperoleh maka sebagian besar masyarakat berada dalam kondisi yang cukup baik, namun sebagian masyarakat berada dalam kondisi yang memperhatikan. Hal tersebut terlihat dari ketidak mampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sebanyak 50 orang responden di kota Makassar yang memiliki pendapatan di bawah Rp. 600.000., perbulan.

### 2) **Kemiskinan perlindungan,**

Permukiman kota Makassar mengalami kemiskinan perlindungan karena:

- a) Dilihat dari segi lingkungan maka kondisi perumahan di kota Makassar dapat dikategorikan tidak bagus. Hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sungai, semak-semak, dan pantai yang menyebabkan tingkat kebersihan pada wilayah tersebut tidak terjaga.
- b) Dilihat dari perbandingan jumlah fasilitas MCK yang tersedia dengan jumlah perumahan penduduk maka jumlah sarana dan prasarana tersebut cukup terpenuhi. Hal ini ditandai dengan terdapatnya 87 orang responden yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri. Namun demikian masih ada juga masyarakat yang tidak memiliki fasilitas MCK dan menganggap bahwa kebutuhan mereka telah terpenuhi walaupun mereka menggunakan pantai, sungai maupun rawa-rawa untuk memenuhinya.
- c) Kebanyakan rumah yang ditempati oleh responden bukan merupakan hak pribadi meskipun tergolong milik pribadi. Hal ini dikarenakan kepemilikan atas tanah yang ditempati merupakan warisan dari orang tua atau milik orang lain yang mereka sewa. Selain itu banyak juga dari

masyarakat yang menempati hunian liar yang tidak memiliki sertifikat.

**3) Kemiskinan pemahaman,**

Permukiman kota Makassar mengalami kemiskinan pemahaman karena:

- a) Dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat kota Makassar termasuk memperhatikan terlihat dari tingkat pendidikan responden umumnya hanya tamat SD. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan biaya antara pemenuhan kebutuhan akan pendidikan dengan pendapatan yang kecil menyebabkan masyarakat sulit untuk mendapatkan pendidikan. Disamping itu, kesadaran akan pentingnya keikutsertaan di sekolah masih sangat minim meskipun berbagai program telah dicanangkan oleh pemerintah namun tidak mampu untuk meningkatkan partisipasi keikutsertaan di sekolah.
- b) Sifat pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat umumnya merupakan warisan turun temurun sehingga masyarakat tidak berniat melakukan perubahan dalam pekerjaannya. Misalnya saja melaut yang mereka anggap warisan dari nenek moyang yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Fenomena kemiskinan yang telah disebutkan di atas tidak membentuk pola kemiskinan partisipasi, kemiskinan identitas ataupun kemiskinan kebebasan, hal ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Masyarakat yang berada di kota Makassar merupakan masyarakat yang heterogen atau masyarakat yang berasal dari berbagai suku seperti Makassar, Jawa, Bugis, Toraja dan lain sebagainya. Walaupun terjadi perbedaan suku namun tidak menjadi kendala untuk melakukan interaksi sosial hal ini disebabkan oleh sifat terbuka masyarakat Makassar untuk menerima keberadaan suku lain.
- 2) Meskipun kemiskinan melanda sebagian besar masyarakat di permukiman kota Makassar tapi tidaklah menjadi permasalahan yang berarti bagi mereka. Kemiskinan tidak harus menjadi halangan untuk menikmati kebebasan.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan kondisi di atas dengan memperhatikan indikator utama kemiskinan maka sebagian besar masyarakat di Kota Makassar tergolong dalam rumah tangga miskin. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi luas bangunan rumah, jenis lantai bangunan, jenis dinding bangunan, penggunaan daging, belanja pakaian, kesanggupan membayar biaya medis, penghasilan kepala rumah tangga, tingkat pendidikan, dan tabungan. Indikator tersebut menjadi dasar dalam menentukan pola kemiskinan jika dikaitkan dengan teori Max-Neef maka masyarakat Kota Makassar membentuk pola kemiskinan subsistensi yang ditimbulkan akibat rendahnya pendapatan masyarakat, kemiskinan pemahaman yang ditandai dengan kualitas pendidikan formal yang buruk, serta kemiskinan perlindungan yang ditandai dengan adanya lingkungan permukiman masyarakat yang buruk.

**REFERENSI**

- Arman Saputra., 2010. *Distribusi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso Kota Makassar* Skripsi Jurusan Geografi FMIPA UNM. Makassar.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Kota Makassar dalam Angka Tahun 2012*. Badan Pusat Statistik. Makassar.
- Biro Pusat Statistik. 2014. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Indonesia*. BPS. Jakarta.
- Suharto, Bahar. 2005. *Pengertian, Fungsi, Format Bimbingan dan Cara Penulisan Karya Ilmiah*. : Tarsito. Bandung
- Suparlan, Parsudi (ed). 2005. *Kemiskinan di Perkotaan Untuk Antropologi*. Yayasan Obor Indonesia-Sinar Harapan. Jakarta.